

Cite this: *J.SST*, Vol.3(1): special issue  
1-7, 2024

Received Date:  
1 November 2023  
Accepted Date:  
20 November 2023

**Keywords:**  
*Communication, Politics, PILKADA, Makassar*

**Kata kunci:**  
Komunikasi, Politik, PILKADA, Makassar

## Peran Komunikasi Politik Elite dalam PILKADA Makassar 2020

### The Role of Elite Political Communication in the 2020 Makassar Regional Election

Fadli Ilham<sup>1\*</sup>; Muhammad Asdar<sup>2</sup>; Firdaus Muhammad<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

\*Email: [ilhamfadli864@gmail.com](mailto:ilhamfadli864@gmail.com); (Email institusi, [pascasarjana@unifa.ac.id](mailto:pascasarjana@unifa.ac.id))

**Abstract.** *This research is motivated by the importance of elite political communication in general elections, especially in general elections, especially in regional elections in Makassar City 2020. The purpose of this study was to determine the comparison of elite political communication of Makassar Mayor candidate Moh. Ramadhan Pomanto-Fatmawati Rusdi and Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando. The theory used in this study is political communication; communicators, political messages, political channels or media, political targets or targets and the influence or effect of political communication. The method used in this study is qualitative descriptive. The resource persons for this research were the winning team and the Mayor of Makassar. The data collection techniques used are interviews with resource persons and through literature reviews. The results of this study show that the influence of Appi-Rahman's elite political communication, in this case Jusuf Kalla, has a major influence in influencing voter participation, it's just that the effectiveness of the Appi-Rahman team to capitalize on the public has not run optimally.*

**Keywords:** *Communication, Politics, PILKADA, Makassar*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya komunikasi politik elite dalam pemilihan umum khususnya, pada pemilihan umum khususnya pada pemilihan kepada daerah di Kota Makassar 2020. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan komunikasi politik elite pasangan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto-Fatmawati Rusdi dan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah komunikasi politik; komunikator, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Narasumber penelitian ini ialah tim pemenangan dan Walikota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber dan melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi politik elite Appi-Rahman dalam hal ini Jusuf Kalla punya pengaruh besar dalam mempengaruhi suara partisipasi pemilih, hanya saja efektivitas dari tim Appi-Rahman untuk mengkapitalisasi kepada masyarakat belum berjalan maksimal

**Kata kunci:** Komunikasi, Politik, PILKADA, Makassar

## PENDAHULUAN

Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia mengalami desentralisasi secara besar-besaran. Di satu sisi terjadi desentralisasi kekuasaan dari tangan lembaga presiden kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Di sisi lain, terjadi desentralisasi otoritas politik dan administrasi dari pusat ke daerah, di beberapa daerah efeknya cukup signifikan yaitu pelaku politik seperti pemerintah daerah, politik lokal, organisasi non pemerintah dan elit lokal sering jadi *immune* terhadap intervensi dari pusat.

Desentralisasi bisa diadopsi meski sistem politik tetap otoritarian atau semioritarian. Di dalam konteks Indonesia, desentralisasi merupakan bagian dari demokratisasi. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung maka dapat dipandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya sistem pemerintah yang tidak sentralistik.

Pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor yang umum dikenal dewasa ini seperti; adanya sistem perwakilan, adanya pemilihan umum secara berkala, adanya keterbentukan dan adanya pengawasan sosial (*social control*) dari rakyat. Pemilihan umum ditingkat lokal memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang antara elite politik secara sengit.

Sistem pemilihan Kepala Daerah baik Bupati, Walikota, dan Gubernur secara langsung, disatu sisi merupakan media pengembangan demokrasi, namun disisi lain merupakan potensi bagi munculnya konflik kepentingan antar berbagai elemen masyarakat terutama antar elite lokal daerah. Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elite lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elite merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial.

Elite merupakan orang-orang yang sukses dan mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Dalam menganalisa kedudukan elite dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan adalah konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya.

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu atau sekelompok individu yang memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan serta perubahan dalam masyarakat, meski perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka lakukan. Satu individu atau sekelompok inilah yang lazim disebut elite. Pemilu/pilkada dapat juga memberi ruang bagi elite-elite masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena elite masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut.

Dalam pemilihan umum, reputasi, popularitas, elektabilitas dan hal sejenis lainnya mutlak dibutuhkan oleh seorang kandidat yang ikut berlaga. Hal ini terkait langsung dengan kemampuan atau kandidat atau tim pendukungnya dalam mengelola dan membangun citra positif seorang kandidat. Kemampuan mengelola citra sangat menentukan dalam menaikkan elektabilitas seorang calon pejabat politik.

Menurut J. Kristiadi dalam Amirudin (2006) partai politik yang seharusnya menjadi instrumen untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat. Cenderung lebih mementingkan calon-calon yang royal kepada atasan dari pada calon di luar partai yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah. Elektabilitas sebagai pemimpin sangat penting fungsinya. Elektabilitas adalah ukuran/tingkat keterpilihan. Ukuran keterpilihan yang dimaksud adalah sejauh mana peluang seseorang dapat dipilih untuk memimpin suatu komunitas dalam regional wilayah tertentu.

Tetapi dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa elektabilitas yang dimaksud adalah elektabilitas yang didapatkan dengan bukti nyata dan kepercayaan dari masyarakat.

Elektabilitas dari pemimpin yang memiliki integritas bukan pemimpin instan. Jika elektabilitas yang seperti ini sudah dimiliki maka akan mudah dalam memimpin. Rakyat sudah mengenal dan percaya akan dengan sangat senang hati mengikuti keinginan pemimpinnya. Dampaknya adalah program-program akan mudah terlaksana karena orang-orang yang dipimpin akan memberikan dukungan.

Argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilukada adalah dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal dan dengan pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau dari daerah.

Dalam Pilkada, komunikasi politik elite diyakini mempunyai pengaruh besar dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Langkah strategis elite dalam dinamika komunikasi politik memiliki kekuatan dalam membentuk citra kandidat yang bertarung dalam pertarungan Pilkada.

Komunikasi politik menjadi penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Salah satu yang berperan sebagai komunikator ialah aktivitas elite saat menciptakan pesan politik secara terbuka kepada publik. Fenomena Pemilihan Walikota (Pilwali) di Kota Makassar 2020 pun tidak terlepas dengan peran komunikasi politik para elit yang dinilai dapat mempengaruhi elektabilitas kandidat dalam konstalasi pemilihan Walikota Makassar. Selain elit politik lokal, hubungan elit politik nasional dengan pasangan calon Walikota Makassar juga menjadi bahan menarik untuk dianalisa secara komprehensif.

**Table 1.** Daftar Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Nomor Urut Kandidat	Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Parpol Pengusul
1	Moh Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi	Gerindra, NasDem
2	Munafri Arifuddin, SH dan DR. Abd Rahman Bando, S.P., M.H	PPP, Demokrat, Perindo
3	DR Syamsu Rizal MI., Sos., M.Si dan dr Fadli Ananda	PDI Perjuangan, PKB, Hanura
4	Irman Yasin Limpo, SH dan Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid	Golkar, PAN, PKS

Sumber : Data KPU Kota Makassar

Penulis merasa tertarik dengan konstalasi Pilwali di Kota Makassar 2020, karena diantara kandidat memiliki hubungan dengan elit yang diyakini dapat meningkatkan elektabilitasnya dan mempengaruhi dukungan masyarakat dalam memenangkan Pemilihan Walikota Makassar. Kendati demikian, penulis hanya terfokus pada pengaruh elit politik kandidat nomor urut 1 Moh Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi dengan kandidat nomor urut 2 Munafri Arifuddin, SH dan DR. Abd Rahman Bando, S.P., M.H.

Kedua paslon Walikota Makassar ini menarik untuk ditelaah dalam aspek komunikasi politik para elit yang mempunyai pengaruh besar ditengah masyarakat dan mampu mobilisasi dukungan dari masing-masing kandidat. Jumlah suara yang diperoleh Moh Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi dalam Pilkada Makassar 2020 tentunya tidak terlepas dengan komunikasi politik yang dibangun oleh elitnya. Salah satu elite yang diyakini mempunyai kekuatan simpatisan adalah Rusdi Mase selaku Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang juga merupakan partai pengusung kandidat nomor urut 1. Figur elit dalam politik yang menduduki jabatan DPR RI Periode 2019-2024 dapil Sulawesi Selatan III tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar melalui kendaraan partai yang berpengaruh di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar.

Sedangkan elit politik Appi-Rahman dapat dibilang mempunyai kekuatan yang cukup besar dan strategis. Hal ini dapat dibenarkan jika ditinjau dari rekam jejak elite politik tersebut. Appi-Rahman secara nyata memiliki hubungan elit politik dengan seorang tokoh yang mempunyai karir politik yang sangat luas karena telah menduduki jabatan sebagai Wakil

Presiden sebanyak dua periode. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) terbukti mendukung secara penuh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando. Adanya hubungan elit politik dengan pasangan calon nomor urut 2 ini diketahui karena Jusuf Kalla mengungkapkan dukungannya secara langsung saat memberi sambutan dalam Deklarasi Appi-Rahman di Hotel Aryaduta Makassar melalui video virtual pada Jumat, 21 Agustus 2020.

(<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/22/video-dukung-appi-rahman-di-pilwali-makassar-jusuf-kalla-appi-mampu-mengangkat-makassar>)

Dalam hasil rekapitulasi hasil pemilu, Moh Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi diputuskan sebagai pemenang Pilkada Makassar. Sementara, Appi-Rahman yang diyakini memiliki kekuatan besar melalui pengaruh tokoh politik yang mempunyai rekam jejak politik hingga menduduki jabatan Wakil Presiden ini justru hanya mendapat jumlah suara pemilih dengan presentase 34,7 persen dibandingkan Danny-Fatma 41,3 persen.

Gambaran tersebut di atas sangat diperlukan adanya penilitan lebih lanjut untuk menganalisis kekuatan elit politik dalam Pilwali Kota Makassar 2020. Mengingat peran elit politik juga mempunyai kekuatan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kandidat dalam Pilkada.

## METODOLOGI

Untuk mengetahui komunikasi politik elite dalam Pilkada Makassar 2020 maka digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel pada penelitian ini adalah peran, komunikasi politik dan elite. Peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Komunikasi politik elite dalam PILKADA Makassar 2020 ini untuk menganalisis peranan elite dalam upaya menarik simpati masyarakat dan memperluas dukungan para kandidat. Dalam penelitian ini peneliti memerankan diri sebagai instrumen penelitian yang berperan aktif dalam kegiatan memperoleh dan mengumpulkan data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan atau memberikan gambaran fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu penelitian kepustakaan, peneliti memulai pengumpulan dan penelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kedua penelitian lapangan peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga yaitu teknik pengabsahan data dengan triangulasi dan member check (pengecekan anggota)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Pilkada Makassar 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Moh. Ramdhan Pomanto-Ratmawati Rusdi (Danny-Fatma), sebagai pemenang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 dengan total perolehan sebanyak 218.908 suara dengan presentase 41,3 % Selanjutnya perolehan suara kedua ditempati pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) meraih sebanyak 184.094 suara dengan presentase 34,7%. Sementara pasangan nomor urut 3, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) memperoleh 100.869 suara dengan presentase 19% dan pasangan nomor urut 4. Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun) memperoleh 25.817 suara dengan presentase 4,9%.

Penelitian penulis yang berjudul “Komunikasi Politik Elite Dalam Pilkada Makassar 2020” akan memfokuskan kepada dua kandidat pasangan calon Walikota Makassar yakni Danny-Fatma dan Appi-Rahman. Dua kandidat ini mempunyai elite politik yang mempunyai pengaruh di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Rusdi Masse sebagai elite politik dari pasangan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, kemudian pasangan nomor urut 2 Munafri Arifudin dan Abdul Rahman Bando yang didukung oleh Jusuf Kalla selaku elite politik.

Berangkat dari analisis di atas, penelitian ini akan mendalami metode perbandingan komunikasi politik elite dari Rusdi Masse dan Jusuf Kalla dalam upaya untuk membangun komunikasi terhadap publik

untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing kandidat pada dinamika Pilkada Makassar 2020.

A. Danny-Fatma (Komunikasi Politik Elite (Rusdi Masse)

Proses komunikasi politik yang dimaksud adalah bagaimana komunikator dalam hal ini elite dari kandidat Pilkada mengirimkan pesan yang disalurkan secara langsung maupun lewat media. Penyaluran secara langsung, dilakukan dengan mendatangi langsung komunikan. Contohnya, penyuluhan dan pidato. Sedangkan, lewat media artinya menggunakan bantuan media, seperti koran, televisi, dan radio. Proses komunikasi politik dimulai saat komunikator mengirimkan pesan bermuatan politik kepada komunikannya, yakni publik atau kelompok masyarakat tertentu.

Koordinator Siber dan Kepemudaan Danny-Fatma, Ahmad Susanto mengatakan bahwa proses komunikasi politik oleh Rusdi Masse tidak hanya melalui media massa, tapi komunikasi langsung. Peran komunikasi politik elite membangun koordinasi hingga terlibat langsung di dalam tim pemenang pasangan nomor urut 1.

Bahkan, Rusdi Masse ikut terlibat dalam memobilisasi struktural partai politik, jaringan pengusaha hingga pada tingkat komunitas untuk memberikan dukungan kepada Danny-Fatma. Komunikasi politik yang dilakukan Rusdi Masse secara eksternal ini bahkan sampai ke akar rumput sehingga mampu untuk memperoleh dukungan yang lebih banyak.

Peran Rusdi Masse dalam menyampaikan pesan politiknya intens dilakukan secara langsung terhadap jaringannya dan simpatisan yang sudah terbentuk. Dengan komunikasi langsung, hubungan emosional tentu akan lebih tersampaikan sehingga pesan yang disampaikan juga sangat mudah diterima oleh masyarakat.

Melalui media massa, pesan politik Rusdi Masse ikut menarik perhatian masyarakat karena memperkenalkan Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi kepada publik. Kekuatan media masa tentunya tidak dapat dipungkiri lagi, selain dapat dilihat dan dibaca oleh berbagai kalangan, peran media masa juga mampu memberikan propaganda.

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap system pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum. Efek positif dari khalayak atau publik politik sangat penting, sekaligus sebagai indikator keberhasilan proses komunikasi politik. Efek inilah yang menentukan perubahan pikiran, sikap dan perilaku khalayak atau publik terhadap pesan politik.

Moh Ramadhan Pomanto membenarkan bahwa elite politik yang paling berpengaruh besar memberikan efek politik terhadap kandidat Danny-Fatma dalam Pilkada Makassar hingga memperoleh suara terbanyak adalah komunikasi politik yang dilakukan Rusdi Masse.

“Besar pengaruhnya Rusdi Masse, yang memastikan bahwa kita lolos dalam administrasi itu yang menentukan. Saya kira di elite politik (Danny-Fatma) itu Pak Rusdi Masse yang paling menonjol”. (Wawancara 15 September 2022).

B. Appi-Rahman (Komunikasi Politik Elite Jusuf Kalla)

Komunikasi politik elite Jusuf Kalla tidak terlibat secara langsung dalam mempengaruhi partisipasi pemilih dengan pertimbangan sebagai seorang negarawan. Jadi hanya memberikan keputusan politik secara testimoni melalui saluran media, kemudian dikapitalisasi oleh Tim Pemenang Appi Rahman.

Diketahui Jusuf Kalla merupakan Wakil Presiden dua periode dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Karir politik yang sudah ditempuh Jusuf Kalla sebagai negarawan ini kemudian menjadi salah satu alasan dari Tim Pemenangan Appi-Rahman, bahwa keputusan politik Jusuf Kalla dalam Pilkada Makassar 2020 tentu mempunyai nilai jual untuk menarik dukungan, tapi disisi yang lain sikap politik tersebut hanya dilakukan secara testimoni dan tidak ikut andil dalam menarik partisipasi pemilih.

Keputusan politik Jusuf Kalla melalui testimoni juga sedikit terlambat karena sudah memasuki pelaksanaan Pilkada atau telah mendekati waktu pencoblosan. Dukungan yang disampaikan dalam rentang waktu yang begitu singkat menjelang pemilihan Walikota Makassar 2020 ini tentu ikut berpengaruh terhadap sikap partisipasi pemilih,



karena kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat ini dimungkinkan sudah ada keputusannya sebelum testimoni yang disampaikan Jusuf Kalla.

Lambatnya pesan politik oleh Jusuf Kalla melalui testimoni ini yang menjadi salah satu alasan Tim Pemenang Appi-Rahman karena ikut berpengaruh terhadap dukungan yang sudah punya keputusan politik lebih awal. Padahal, dalam konteks elite, Jusuf Kalla bukanlah figur yang asing di masyarakat Kota Makassar.

Peluang untuk menempatkan Jusuf Kalla sebagai elite yang diyakini mampu mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap Appi-Rahman ini dinilai tidak berjalan secara efektif, meski Tim Pemenangan masih mempunyai kesempatan untuk mengkapitalisasi ketokohan Jusuf Kalla dalam memperoleh dukungan yang lebih banyak dalam Pilkada Makassar 2020.

Disisi lain, meski pun sikap politik Jusuf Kalla mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat, namun wilayah demografis Makassar merupakan kota yang dipadati dengan penduduk heterogen sehingga keterlibatan elite atau figur seperti Jusuf Kalla lebih dipandang sebagai simbolisasi.

Melalui penelitian ini, mengindikasikan bahwa peran elite dalam mempengaruhi dukungan dalam Pilkada harus didorong dengan komunikasi politik yang mampu menggerakkan masyarakat sehingga memberikan dapat memberikan dukungan kepada kandidatnya masing-masing.

Pelaksanaan Pilkada Kota Makassar 2020 menunjukkan bahwa komunikasi politik elite masih diperlukan dan digunakan sebagai salah satu strategi untuk mempengaruhi masyarakat melalui figur dan ketokohan yang dimiliki oleh elite tersebut. Hal ini termasuk langkah strategis jika komunikasi politik dapat dilakukan dengan maksimal.

## SIMPULAN

Komunikasi politik elite masih mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada kandidatnya dalam sebuah pemilihan kepala daerah.

Kekalahan paslon nomor urut 2 Munrfi Arifuddin dan Abd Rahman Bando bukan karena komunikasi politik elite tidak memiliki pengaruh besar menarik simpatisan masyarakat, tapi karena Jusuf Kalla tidak ikut serta dalam memobilisasi pendukungnya dengan pertimbangan sebagai negarawan sehingga hanya memberikan keputusan politik kepada publik.

Faktor lainnya, Tim Pemenangan Appi-Rahman belum maksimal mengkapitalisasi ketokohan dan pengaruh Jusuf Kalla kepada masyarakat Kota Makassar untuk menarik partisipasi pemilih dalam Pilkada Makassar.

Pengaruh komunikasi politik elite terhadap kandidat Pilkada ini terbukti seperti yang dilakukan elite politik paslon nomor urut 1, Moh Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Pesan politik dilakukan Rusdi Masse secara langsung dan melalui media massa. Hal ini kemudian menarik simpul di jaringannya dari tingkat pengusaha hingga komunitas.

Komunikasi politik Rusdi Masse ini juga masif dilakukan dari internal Tim Pemenang Danny-Fatma sehingga ikut dan terlibat memberikan pandangan dan strateginya dalam upaya untuk memastikan sosialitasi politik tetap berjalan dan juga memperluas dukungan kepada Danny-Fatma.

## REFERENSI (After 3 pt)

- 1 Komisi Pengawasan Pemilu (KPU), Kota Makassar, 2020.
- 2 Muchtar, Khoiruddin. 2016, Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 3 Schulte, Henk. 2007. Lokal Politics in Post-Suharto Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 4 Lumendek, Destrina. 2017. Peran Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Manado: Fisip Unsrat.
- 5 Jafar, Ma'sum. 2019. Pengaruh Citra Politik Terhadap Elektabilitas Calon Bupati 2018 Di Kabupaten Luwu, Makassar.

- 6 Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 7 UU No.32, Tahun 2004 Tentang Pemilihan Daerah.
- 8 Kansil. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- 9 Fadli, Muhammad. 2015. Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Tahun 2015. Makassar: Fisip Unhas.
- 10 Varma, 2007. Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 11 Hasrullah, 2001. Megawati dalam Tangkapan Pers. Yogyakarta: LKiS.
- 12 Rafael R. Maran. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Rineka Cipta., hal. 158.
- 13 Surjaman. Tjun. 1989. Dalam Komunikasi Politik Khalayak dan Bandung: Remaja Rosda Karya.
- 14 Aidar, Iqbal. Idrus dan Titin Purwaningsih. 2014. Peran Elit Politik Dalam Kemenangan Partai Gerindra Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Luwu Utara
- 15 Nisa, Pia Khoirotun. 2020. Karakteristik Budaya Komunikasi Politik elite Muhammadiyah. Jakarta.
- 16 Chalik, Abdul. 2017. Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- 17 Dewi, Diana, Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto. 2018. Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indralaya 30662, Indonesia